

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada 1 November 1991. Setelah sukses dengan berdirinya Bank Muamalat dengan tema syariah, maka bank-bank konvensional lain disarankan untuk membuka cabang syariah yang diarahkan oleh undang-undang syariah No 10 tahun 1998. Hal ini menimbulkan keikutsertaan semua perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan aktifitasnya dalam mengelola produk produk syariah yang paradigma ekonominya tidak lepas dari Al-quran dan As-sunnah.

Perbankan syariah mempunyai prinsip yang juga sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), bank sebagai pengelola dana (mudharib) dari nasabah yang memiliki dana (shahibul maal) dengan nasabah yang membutuhkan dana, tetapi ada pula prinsip-prinsip lain yang tidak digunakan dalam pengoperasian bank konvensional, yaitu tidak melakukan adanya prinsip bunga pada pembiayaan atau penyaluran dananya. Pembiayaan atau penyalur dana yang digunakan di dalam bank syariah meliputi Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah dsb . Dengan adanya bank Syariah, banyak masyarakat dan para pelaku bisnis yang mengincar dengan melakukan investasinya untuk penyaluran dana tanpa ada rasa bimbang dalam jaminan halal dan aman.

Bank Syariah memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam melakukan suatu penyaluran dana, bank syariah melakukan kegiatan penyaluran ini dengan memberikan jasa dan layanan-layanan seperti pembiayaan dan investasi. Contoh pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah *murabahah*, yang definisi *murabahah* menurut PSAK no 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu (PSAK No 102 paragraf 8). Pembiayaan *murabahah* tidak terlepas dari implementasi akuntansi yang dimana untuk membantu kesuksesan dalam melakukan transaksi dan menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan suatu transaksi. Perbedaan implementasi akuntansi tersebut dapat menyebabkan dampak negatif di dalam laporan keuangan khususnya dalam menentukan hasil laba rugi suatu perusahaan. Pembiayaan *murabahah* dapat bersifat pembiayaan konsumtif yang dimana pembiayaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti: pembelian kendaraan, pembelian rumah, serta pembelian kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh nasabah. Pembiayaan *murabahah* juga dapat bersifat sebagai pembiayaan produktif karena pembiayaannya terkait dengan modal kerja dan investasi.

Tabel 1.1
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Rp. Miliar)

Keterangan	2008	2009	2010	2011
Kegiatan Pembiayaan Syariah (netto):	490,23	540,77	2.148,76	3.944,48
Piutang Murabahah	396,39	427,90	2.014,92	3.726,04
Piutang Istishna'	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Salam	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Hiwalah	6,85	7,29	7,29	3,10
Aktiva Ijarah	0,00	0,00	11,61	8,86
Aktiva Ijarah Muntahiyah Bittamlik	86,99	105,59	114,94	206,48
Aktiva Ijarah Musyarakah Muntanaqisah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumber Pendanaan :	283,90	341,88	1.815,50	3.495,87
Pendanaan Mudharabah	0,00	39,33	399,33	689,69
Pendanaan Mudharabah Muqayyadah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendanaan Musyarakah	46,71	55,30	322,15	763,71
Fasilitas Pendanaan Murabahah	228,62	245,33	1.089,29	2.021,10
Ijarah Sukuk	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendanaan Lain Berbasis Syariah	8,57	1,92	4,72	21,36

Sumber : Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011 (Bank Indonesia)

Berdasarkan survey sementara di atas, tiga tahun terakhir pembiayaan pada bank-bank syariah yang ada di Indonesia cukup meningkat pesat menurut Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) yang ada di Bank Indonesia Tahun 2011. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang diminati cukup banyak nasabahnya daripada pembiayaan lainnya , karena murabahah merupakan jual beli yang angsurannya tetap sepanjang waktu pembiayaan. Pada tabel diatas, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh industri Perusahaan Pembiayaan masih didominasi oleh kegiatan Murabahah yang digunakan nasabah untuk transaksi jual beli , yaitu sebesar Rp3.726,83 miliar atau

sekitar 94,48% dari total piutang pembiayaan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya ketertarikan konsumen pada jenis pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang bersifat konsumtif, seperti kendaraan bermotor, yang juga didukung dengan persyaratan pemberian kredit yang cukup mudah dan pemrosesan pemberian kredit yang cepat.

Bank Syariah Mandiri berdiri sejak tahun 1999, Bank ini merupakan konversi dari Bank Susila Bhakti (BSB) dari bank konvensional menjadi bank syariah, lalu BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Bank Syariah Mandiri berdiri setelah bank Muamalat, karena peminat dari bank tersebut terlalu banyak, maka didirikan cabang di seluruh Indonesia guna memenuhi kebutuhan bagi nasabah yang ingin bertransaksi Islami atau Syariah. PT Bank Syariah Mandiri ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Permasalahan yang terjadi pada penelitian terdahulu, terdapat kasus bahwa pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru untuk akad murabahah, pada saat

perolehan aset untuk tujuan dijual kembali kepada nasabah tidak dilakukan pencatatan oleh bank bersangkutan, berarti aset yang diperoleh sebelum diserahkan kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah tidak diakui oleh bank. Hal tersebut sangat bertentangan oleh dengan PSAK No 102, yang dimana dalam PSAK No 102 tentang akuntansi murabahah dinyatakan bahwa pada saat perolehan, aset murabahah untuk tujuan dijual kembali diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. (Jeni&Gusma, 2011:448).

Berdasarkan kasus di atas peneliti ingin mengetahui apakah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tuban, sudah menerapkan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan PSAK no 102 atau ada yang sama dengan kasus yang terjadi pada Bank Muamalat diatas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada murabahah, dengan mengambil judul **“Implementasi PSAK No 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera di atas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Tuban ?
2. Apakah penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tuban sudah sesuai dengan PSAK no 102 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan murabahah yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tuban.
2. Untuk mengetahui kesesuaian dalam penerapan pembiayaan murabahah terhadap PSAK No 102 yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian diatas, diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi pihak-pihak yang terkait :

1. Bagi Bank

Sebagai suatu masukan , pengkoreksian dan evaluasi dalam menerapkan akuntansi syariah pembiayaan murabahah yang telah di atur dalam PSAK no 102 dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan tentang arti pembiayaan murabahah sendiri beserta penerapannya dan sebagai pengalaman dapat terjun langsung ke lapangan untuk berwawancara guna mengerti kelebihan dari sistem pembiayaan terutama murabahah.

3. Bagi Pembaca

Untuk mengetahui arti murabahah dan memberikan solusi pemahaman yang terbaik sebagai tambahan informasi bagi pembaca agar mengerti aspek aspek pembiayaan murabahah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui sistematika secara keseluruhan mengenai penulisan ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dituliskan dan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penulisan, perumusan masalah , tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang bagaimana suatu rancangan penelitian serta definisi penelitian data, dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini menjelaskan secara garis besar tentang Sejarah perusahaan, analisis data yang terdiri dari pengertian Murabahah, syarat transaksi Murabahah, dan Laporan keuangan di Bank Syariah Mandiri.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang di jabarkan oleh peneliti, keterbatasan penelitian, serta saran yang nantinya berguna untuk perbaikan penelitian dan juga sebagai wacana untuk peneliti selanjutnya.